

## BAB V

### PENUTUP

#### 5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah disajikan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Kabupaten yang memiliki perkembangan opini audit BPK paling baik yaitu kabupaten pada Jambi dengan persentase kenaikan rata-rata per tahunnya sebesar 12,68%. Untuk kabupaten yang memiliki perkembangan opini audit BPK paling buruk yaitu kabupaten pada Gorontalo dengan persentase rata-rata kenaikan per tahunnya sebesar 0,76%.
2. Kota yang memiliki perkembangan opini audit BPK paling baik yaitu Kota pada Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Bengkulu, dan Kalimantan Tengah dengan persentase kenaikan rata-rata per tahunnya sebesar 16,67%. Untuk kota yang memiliki perkembangan opini audit BPK paling buruk yaitu kota pada Papua Barat dengan persentase rata-rata kenaikan per tahunnya sebesar -10,00%.
3. Provinsi yang memiliki perkembangan opini audit BPK paling baik yaitu Provinsi DKI Jakarta dimana persentase rata-rata kenaikan per tahunnya sebesar 16,67%. Sedangkan provinsi yang memiliki perkembangan opini audit BPK paling buruk se-indonesia yaitu Provinsi Sumatera Selatan dimana persentase rata-rata kenaikan pertahunnya menunjukkan angka minus sebesar -4,71%.

4. Dilihat dari pembagian wilayah di Indonesia , wilayah yang memiliki perkembangan opini audit BPK paling baik yaitu wilayah bagian timur dengan angka rata-rata 7,34%, sedangkan wilayah yang memiliki perkembangan opini Audit BPK paling buruk yaitu wilayah bagian tengah dengan angka rata-rata 5,05%.
5. Secara keseluruhan, perkembangan opini audit BPK atas LKPD se-indonesia sudah mengalami perkembangan kearah baik. Hal itu terlihat dari persentase rata-rata kenaikan per tahunnya sudah banyak daerah yang menunjukan kenaikan ke angka positif baik di tingkat provinsi, kota dan kabupaten.

## **5.2. Keterbatasan Penelitian**

Dalam penelitian ini terdapat beberapa keterbatasan yang dapat diajukan sebagai acuan untuk peneliti selanjutnya. Beberapa keterbatasan tersebut antara lain :

1. Rata-rata yang diperoleh dibagi berdasarkan jumlah Kabupaten, Kota dalam setiap Provinsi, sehingga pembagian untuk mencari rata-rata tidak sama untuk masing-masing baik kabupaten, Kota, dan Provinsi.
2. Peneliti tidak menelusuri lebih jauh penyebab perkembangan opini audit BPK dari tahun ke tahun, peneliti hanya menganalisis opini yang diperoleh atas LKPD dari tahun ke tahun.
3. Perkembangan atas opini audit BPK hanya dilihat berdasarkan besarnya angka presentase yang diperoleh daerah , sehingga daerah yang memperoleh opini paling baik berturut-turut setiap tahunnya maka tidak terlihat peningkatan persentase kenaikannya.

### 5.3. Saran

Dari penelitian yang telah dilakukan, peneliti memberikan saran sebagai berikut:

1. Masing-masing LKPD agar mampu memperoleh opini WTP dari BPK, terkhusus bagi LKPD yang belum memperoleh opini WTP.
2. Untuk peneliti selanjutnya, agar penelitian ini dapat menjadi referensi dan dapat memperluas penelitian ini yaitu tidak hanya lingkup opini audit BPK atas LKPD saja, namun juga opini audit BPK atas LKKP, LKKL dan LKBUN.

